

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Oktober 2025 2,00 % (Y-on-Y), -0,04 % (M-to-M)

November 2025 2,40 % (Y-on-Y), 0,58 % (M-to-M)

Desember 2025 2,39 % (Y-on-Y), 0,81% (M-to-M)

Inflasi Tahunan Provinsi NTT Bulan DESEMBER 2025 (Y-on-Y) mengalami INFLASI sebesar 2,39%. Angka ini juga menjadi rujukan angka inflasi Kalender (Y-to-D), berada pada Rentang Sasaran ($2,5\% \pm 1\%$).

Inflasi NTT berada di bawah angka inflasi Nasional pada urutan ke 6 Provinsi terendah, dimana angka inflasi Nasional baik inflasi tahunan (Y-on-Y) maupun inflasi kalender (Y-to-D) yaitu 2,92%;

Sedangkan Pengukuran IHK pada 5 wilayah di Provinsi NTT Bulan Desember 2025 (Y-on-Y) dan (Y-to-D) adalah:

1) Maumere = 0,38% (YoY)

2) Waingapu = 3,09% (YoY)

3) Kab TTS = 1,77% (YoY)

4) Ngada = 1,74% (YoY)

5) Kota Kupang = 2,93% (YoY)

Keseluruhan 5 kota / wilayah pengukuran IHK ini, berada pada rentang sasaran ($2,5\% \pm 1\%$),

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Kendala yang dihadapi

- Laju inflasi NTT pada November dan Desember 2025 tetap terjaga dalam kisaran meski dengan tendensi meningkat
- Resiko pendorong inflasi
 - Faktor cuaca yang beresiko menghambat produksi dan distribusi komoditas perikanan dan hortikultura
 - Berlanjutnya kenaikan harga emas dunia seiring dengan kebijakan Bank sentral Tiongkok dan Rusia untuk meningkatkan cadangan devisa emas
 - *Demand pull inflation* untuk CI dan VF seiring dengan peningkatan optimisme dan pengeluaran konsumsi pada momen Nataru
- Berdasarkan komoditasnya, perlu diwaspadai peningkatan inflasi bulanan pada komoditas hortikultura, sayuran dan ikan. Sementara itu, peningkatan harga pada komoditas emas perhiasan masih menjadi penyumbang utama inflasi tahunan

2. Klasifikasi permasalahan

- Ketersediaan pasokan :
- Kondisi pasokan dan stok komoditas pangan rata-rata masih terjaga antara 1-3 bulan

kedepan. Terutama pada komoditas beras, ketahanan stok mencapai 2,91 bulan.

- Kondisi pasokan khusus komoditas gula pasir, minyak goreng, daging sapi, telur ayam, dan cabai merah besar stoknya kurang dari 1 bulan.
- Masih terdapat ketergantungan terhadap impor untuk komoditas tertentu sehingga ketersediaan pasokan dipengaruhi oleh faktor iklim.
- Belum tersedianya *cold storage* khusus Hortikultura.
 - Keterjangkauan harga :
- Pada triwulan IV ini komoditas bawang merah, bawang putih, dan bombay putih rata-rata mengalami kenaikan 2%-7% dan untuk komoditas cabai (cabai merah besar, merah keriting besar dan rawit merah) mengalami kenaikan 14%-17%.
 - Kelancaran distribusi :
- Belum semua kabupaten di Provinsi NTT menganggarkan pemberian subsidi transportasi dalam rangka pengendalian inflasi melalui anggaran BTT
 - Komunikasi efektif : -

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Upaya Pengendalian Inflasi oleh Provinsi NTT, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi NTT (TPID NTT) berupa kegiatan melakukan pengendalian Inflasi diantaranya:

- Mengikuti RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang dipimpin Oleh Mendagri secara *hybrid* setiap hari Senin.
- Penyampaian Informasi Harga pangan wilayah pengukuran IHK tiap minggu melalui kanal media sosial Bank Indonesia Provinsi NTT.
- Melakukan Kerja Sama Antar Daerah diantaranya:
 1. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dan NTB dan NTT tentang kerja sama regional Bali NTB NTT
 2. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi NTT tentang Kerja Sama Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan
 3. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi NTT tentang Kerja Sama Bidang Kelautan dan Perikanan
 4. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi NTT tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian dan Perdagangan
 5. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi NTT tentang Fasilitas Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan
- Penyusunan Surat Keputusan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Provinsi NTT yang ditetapkan oleh Gubernur NTT dengan nomor 499/KEP/HK/2025
- Pelaksanaan (High Level Meeting) HLM TPID dan TP2DD Provinsi NTT yang dipimpin oleh Gubernur NTT tanggal 6 Desember dihadiri Forkompimda, dan seluruh anggota TPID Provinsi NTT, diselenggarakan di Hotel HARPER KUPANG.
- Pelaksanaan Realisasi Bantuan Pangan oleh BULOG per 28 Desember 2025 mencapai 74,53% dan realisasi SPHP per 28 Desember 2025 mencapai 85,23%.
- Pelaksanaan Rapat Teknis pengendalian inflasi Daerah oleh TPID Provinsi NTT pada tanggal 19 Desember 2025, di Hotel Sasando Kupang, NTT.
- Pelaksanaan Sidak yang dipimpin oleh Gubernur di Gudang Bulog Alak, Terminal Peti Kemas Pelindo Tenau Kupang, Pasar Kasih Naikoten, dan Bandara Eltari Kupang, pada tanggal 23 Desember 2025.

Pelaksanaan pasar murah bersubsidi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT bertempat di:

1. Sumba Timur tanggal 28 dan 29 Oktober 2025
 2. Sabu Raijua Tanggal 28 dan 29 Oktober 2025
 3. Manggarai 23 dan 24 Oktober 2025
 4. Ende tanggal 15 sampai 18 Oktober 2025
- Pelaksanaan pasar murah menjelang Hari Raya Besar Keagamaan (HBKN) yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT bersama Bank Indonesia bertempat di:
 1. Gereja Imanuel Kolhua tanggal 18 November 2025
 2. Gereja lahairoi Lasiana tanggal 19 November 2025
 3. Gereja Shalom Air Nona tanggal 20 November 2025
 4. Gereja Maranatha Teunbaun tanggal 21 November 2025
 5. Kantor Camat Kupang Barat tanggal 25 November 2025
 6. Gereja Imanuel Baumata tanggal 26 November 2025
 7. Gereja Eden Kisbaki Manutapen tanggal 27 November 2025
 8. Gereja Emaus Oebelo tanggal 28 November 2025
 9. Halaman Gedung NTT Mart tanggal 1 Desember 2025
 10. Gereja Sonafhonis Oekabiti tanggal 2 Desember 2025
 - Pelaksanaan Rapat Tim Pembahasan Perekonomian Daerah Provinsi NTT terkait Pengendalian inflasi dan Perkembangan kinerja perekonomian Provinsi NTT.
 - Forum bisnis NTT - Jatim dalam rangka meningkatkan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang dilaksanakan oleh Kadin Masing-masing Provinsi untuk dapat menjaring pelaku usaha yang akan melaksanakan KAD.
 - Penyiaran Adlibs Harga Pangan Strategis, hibauan bijak berbelanja, dan diversifikasi pangan secara mingguan melalui RRI Kupang.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Adanya rekomendasi HLM TPID dan TP2DD pada tanggal 6 Desember 2025 tentang stabilisasi harga konsumen di pasar strategis, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, stabilitas harga, komunikasi efektif, Kerja sama Antar Daerah, dan Percepatan dan optimalisasi elektronisasi Pemerintah Daerah.
2. Penerbitan Surat Keputusan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Provinsi NTT yang ditetapkan oleh Gubernur NTT dengan nomor 499/KEP/HK/2025 pada tanggal 9 Desember 2025
3. Untuk komoditas beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam ras, susu, jagung pipilan, garam beryodium, tepung terigu dan kacang-kacangan rata-rata harganya tidak mengalami kenaikan atau masih terkendali.
4. Adanya Kerjasama Antar Daerah (KAD) berupa penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dan NTB dan NTT tentang kerja sama regional Bali NTB NTT dengan tujuan penguatan pasokan komoditas defisit.
5. Telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antar daerah, sebagai berikut:
 - Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Lampung, Banten, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur tentang ketahanan pangan.
 - Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi NTT tentang Kerja Sama Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan
 - Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah

◦

- Provinsi NTT tentang Kerja Sama Bidang Kelautan dan Perikanan
 - Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi NTT tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian dan Perdagangan
 - Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi NTT tentang Fasilitas Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan
 - Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penguatan Perdagangan dan Ekspor Kerja Sama Regional Bali NTB NTB.
6. Adanya Kerjasama Antar Daerah (KAD) antar kabupaten/kota untuk tujuan pemerataan distribusi pasokan dan memperkecil disparitas harga
 7. Berdasarkan hasil sidak pasar yang dilaksanakan oleh anggota TPID bahwa terdapat beberapa kelompok komoditas diantaranya bawang merah, bawang bombay mengalami kenaikan 2%-7% dan komoditas cabai merah besar, cabai merah keriting mengalami kenaikan harga sebesar 14%-17%.
 8. Stok beras di seluruh gudang BULOG per tanggal 23 Desember 2025 mencapai sekitar 10.540 ton yang mana jumlah tersebut dinyatakan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga tiga bulan kedepan.
 9. Terminal Peti Kemas Kupang memastikan aktivitas bongkar muat dan distribusi logistik di NTT berjalan lancar menjelang perayaan hari raya Natal 2025 dan tahun baru 2026
 10. Seluruh komunikasi yang berkaitan dengan inflasi berjalan dengan baik antara lain HLM, Rapat koordinasi perekonomian, Rapat Teknis dan pelaksanaan Sidak ke Pasar, gudang BULOG, gudang distributor, pelabuhan dan bandara.
 11. Pelaksanaan pasar murah di beberapa Kabupaten sebagai upaya pengendalian inflasi berjalan dengan baik
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi NTT tanggal 6 Desember 2025 menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Stabilisasi harga konsumen di pasar strategis
 - Optimalisasi pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi/non subsidi, operasi pasar, pelaksanaan SPHP, Gerakan pangan murah
 - Melakukan sidak pasar, monitoring pasokan, harga dan distribusi di pasar, distributor, gudang Bulog dan Pelabuhan
 - Optimalisasi peran satgas pangan
2. Ketersediaan pasokan bahan pangan kebutuhan pokok
 - Mendorong masyarakat di daerah urban, seperti Kota Kupang untuk menerapkan Pekarangan Pangan Lestari dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga
 - Melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke pasar maupun distributor, untuk monitoring ketersediaan pasokan pangan strategis dan stabilitas harga
3. Kelancaran distribusi
 - Revitalisasi pelabuhan yang menjadi jalur distribusi pasokan pangan untuk mendukung kelancaran distribusi pangan
 - Mendorong pemanfaatan cold storage untuk memperpanjang masa simpan dan mengurangi frekuensi pengiriman

Stabilitas harga

4.
 - Memperkuat peran NTT Mart sebagai offtaker hasil panen petani di Provinsi NTT dengan harga yang stabil
 - Intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM) /operasi pasar
5. Komunikasi efektif
 - Memperluas digitalisasi pasar tradisional melalui penyediaan informasi harga pangan yang dapat diakses oleh Masyarakat
 - Himbauan belanja bijak dan diversifikasi pangan dalam memenuhi kebutuhan HBKN Nataru
6. Kerjasama Antar Daerah (KAD)
 - Melaksanakan KAD KR-BNN (Kerjasama Regional Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur) dengan tujuan penguatan pasokan komoditas defisit dengan mempertimbangan perbaikan neraca perdagangan. (Fokus pada komoditi beras, bawang putih, daging ayam ras, dan telur ayam ras sedangkan ekspor untuk set off defisit yaitu komoditi daging sapi, jagung)
 - Mendorong KAD antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi NTT untuk tujuan pemerataan distribusi pasokan dan memperkecil disparitas harga. (Fokus pada komoditi beras, bawang merah, aneka cabai)
7. Percepatan dan optimalisasi elektronisasi Pemerintah Daerah
 - Menyusun Peta Jalan atau Roadmap P2DD untuk tahun 2026-2030 yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai bagian dari komitmen Pimpinan daerah untuk mempercepat digitalisasi daerah dan optimalisasi PAD
 - Membuat program unggulan yang sejalan dengan Roadmap P2DD untuk meningkatkan minat masyarakat untuk dapat menunaikan kewajiban pajak/retribusinya melalui kanal digital, terutama QRIS
 - Perluasan penggunaan KKI. Percepatan distribusi KKI kepada seluruh OPD guna memperluas penggunaan KKI oleh seluruh OPD di Lingkup Provinsi NTT
 - Penambahan fitur KKI oleh Bank RKUD seperti QRIS dan online payment untuk mendukung penggunaan KKI oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Kupang, 20 Januari 2026

KEPALA BIRO

PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

SETDA PROVINSI NTT,

Selfi H. Nange, S.Sos.,M.Si.,M.Pub,Pol

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197606091995032001